

Dampak Korupsi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Tinjauan Sederhana

Nanda Kurniawan Tanjung¹, Khairil Rahmadi²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email: nandatanjung381@gmail.com

ABSTRAK

Korupsi merupakan salah satu permasalahan utama yang berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia, baik dalam aspek ekonomi, pelayanan publik, maupun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak korupsi secara sederhana dengan menggunakan metode library research melalui kajian berbagai sumber literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi menyebabkan meningkatnya kemiskinan, ketimpangan sosial, serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi akibat penyalahgunaan sumber daya publik dan menurunnya investasi. Selain itu, korupsi juga berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan, serta meningkatnya biaya layanan yang harus ditanggung masyarakat. Lebih lanjut, berbagai kasus korupsi seperti bantuan sosial dan dana desa menunjukkan bahwa korupsi turut menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan melemahkan partisipasi publik. Dengan demikian, pemberantasan korupsi secara konsisten dan menyeluruh menjadi langkah penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Kata Kunci: Korupsi; Kesejahteraan Masyarakat; Pelayanan Publik; Kepercayaan Masyarakat; Kemiskinan; Ketimpangan Sosial.

ABSTRACT

Corruption is a major problem that significantly impacts public welfare in Indonesia, including economic aspects, public services, and public trust in the government. This study aims to analyze the impact of corruption in a simple manner using library research methods through a review of various scientific literature sources. The results indicate that corruption leads to increased poverty and social inequality, as well as hampered economic growth due to the misuse of public resources and decreased investment. Furthermore, corruption also impacts the declining quality of public services, particularly in the education and health sectors, as well as increasing service costs borne by the public. Furthermore, various corruption cases, such as those involving social assistance and village funds, demonstrate that corruption contributes to diminishing public trust in the government and weakening public participation. Therefore, consistently and comprehensively eradicating corruption is a crucial step in realizing public welfare and better governance.

Keywords: Corruption; Public Welfare; Public Services; Public Trust; Poverty; Social Inequality.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang masih dihadapi oleh Indonesia hingga saat ini. Praktik ini tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi juga merambah hingga ke tingkat daerah dan berbagai sektor kehidupan. Korupsi seringkali melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi telah menjadi masalah sistemik yang sulit diberantas secara menyeluruh. Oleh karena itu, korupsi menjadi isu penting yang perlu dikaji secara mendalam karena dampaknya yang luas terhadap masyarakat (Alpiani Miulyadi, 2024).

Secara umum, tingkat korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi dan menjadi penghambat utama pembangunan nasional. Hal ini terlihat dari berbagai kasus korupsi yang terus terungkap setiap tahunnya. Korupsi juga mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum di suatu negara. Selain itu, praktik korupsi dapat terjadi karena adanya peluang, kekuasaan, serta lemahnya integritas individu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan moral dan sosial (Ihfan, 2024).

Dampak korupsi terhadap kesejahteraan masyarakat sangat signifikan, terutama dalam bidang ekonomi. Korupsi menyebabkan pemborosan anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan. Akibatnya, program-program kesejahteraan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi terhambat. Selain itu, korupsi juga mengurangi efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik. Hal ini pada akhirnya berdampak pada menurunnya kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Korupsi juga memiliki hubungan yang erat dengan meningkatnya angka kemiskinan dan ketimpangan sosial. Ketika anggaran negara disalahgunakan, masyarakat yang seharusnya menerima manfaat justru menjadi korban. Distribusi kekayaan menjadi tidak merata dan hanya dinikmati oleh segelintir pihak. Selain itu, korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Akibatnya, kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin semakin melebar (Dea Cintana, Alfiah Salsa Haidillah, Siti Alia Zulfa, Alvira Aprilisha Muhadi, 2023).

Selain berdampak pada aspek ekonomi, korupsi juga mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan menjadi tidak optimal akibat penyalahgunaan dana. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan haknya secara layak. Di sisi lain, korupsi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi negara. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial dalam jangka panjang (Pratama, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak korupsi terhadap kesejahteraan masyarakat serta bagaimana keterkaitan antara korupsi dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Permasalahan ini penting untuk dikaji agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai konsekuensi dari praktik korupsi. Selain itu, rumusan masalah ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang paling terdampak oleh korupsi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Kajian ini juga dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam pemberantasan korupsi (Rizky Subhan, 2024).

Adapun tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk menganalisis dampak korupsi terhadap kesejahteraan masyarakat secara sederhana namun komprehensif. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara korupsi dengan kemiskinan, ketimpangan sosial, serta kualitas pelayanan publik. Selain itu, penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya korupsi.

Dengan adanya pemahaman yang baik, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera (Bramudia, Muhammad Farhan Asmoro & Hossam, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode library research atau studi kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengandalkan berbagai sumber tertulis sebagai data utama. Sumber data dalam penelitian ini meliputi jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, serta dokumen resmi yang relevan dengan topik korupsi dan kesejahteraan masyarakat. Metode ini tidak memerlukan penelitian lapangan karena fokus utamanya adalah pada analisis literatur yang telah ada. Pendekatan ini bersifat kualitatif dan deskriptif, sehingga mampu menggambarkan fenomena secara sistematis dan mendalam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian berbagai literatur yang relevan, kemudian diseleksi berdasarkan tingkat keterkaitan dan kebaruan sumber. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan, membandingkan, dan menyusun informasi menjadi suatu kesimpulan yang sistematis. Proses analisis juga melibatkan pengelompokan data berdasarkan tema pembahasan, seperti dampak ekonomi, pelayanan publik, dan kepercayaan masyarakat. Dengan cara ini, penelitian mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai dampak korupsi. Oleh karena itu, metode library research dinilai tepat digunakan dalam penelitian ini karena mampu menghasilkan analisis yang mendalam tanpa harus melakukan observasi langsung di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Korupsi terhadap Ekonomi Masyarakat

Korupsi memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kondisi ekonomi masyarakat, terutama dalam menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Praktik korupsi menyebabkan alokasi sumber daya menjadi tidak efisien karena dana publik disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, pembangunan ekonomi yang seharusnya merata menjadi terhambat. Selain itu, korupsi juga mengurangi kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi suatu negara. Kondisi ini pada akhirnya berdampak langsung pada menurunnya kesejahteraan masyarakat (Tyas, 2024).

Salah satu dampak utama korupsi adalah meningkatnya angka kemiskinan di masyarakat. Hal ini terjadi karena anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk program kesejahteraan justru diselewengkan. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat korupsi dan peningkatan kemiskinan. Semakin tinggi tingkat korupsi, maka semakin besar pula angka kemiskinan yang terjadi. Dengan demikian, korupsi menjadi faktor utama yang memperburuk kondisi ekonomi masyarakat (Uzumaki et al., 2025).

Selain meningkatkan kemiskinan, korupsi juga menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini disebabkan oleh menurunnya investasi baik dari dalam maupun luar negeri akibat rendahnya kepercayaan terhadap sistem ekonomi yang tidak transparan. Investasi yang rendah berdampak pada terbatasnya lapangan kerja dan meningkatnya pengangguran. Akibatnya, daya beli masyarakat pun menurun secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi memiliki efek berantai terhadap berbagai aspek ekonomi.

Korupsi juga berdampak pada meningkatnya biaya layanan publik yang harus ditanggung oleh masyarakat. Praktik pungutan liar dan manipulasi anggaran menyebabkan biaya layanan menjadi lebih mahal dari yang seharusnya. Masyarakat akhirnya harus membayar lebih untuk mendapatkan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Kondisi ini tentu memperburuk kesejahteraan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan demikian, korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga membebani masyarakat secara langsung.

Dampak lain dari korupsi adalah meningkatnya ketimpangan ekonomi dalam masyarakat. Distribusi pendapatan menjadi tidak merata karena keuntungan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir pihak. Korupsi menyebabkan akses terhadap sumber daya ekonomi menjadi tidak adil. Akibatnya, kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin semakin melebar. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga merusak keadilan sosial (Dea Cintana, Alfiah Salsa Haidillah, Siti Alia Zulfa, Alvira Aprilisha Muhadi, 2023).

Secara keseluruhan, korupsi memberikan dampak negatif yang luas terhadap ekonomi masyarakat. Mulai dari meningkatnya kemiskinan, menurunnya investasi, hingga mahalnya layanan publik, semuanya berakar pada praktik korupsi. Kondisi ini menciptakan siklus ekonomi yang tidak sehat dan sulit untuk diperbaiki. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini harus dilakukan secara sistematis dan melibatkan seluruh elemen masyarakat (Hasibuan et al., 2024)

Dampak Korupsi terhadap Pelayanan Publik

Korupsi dalam pelayanan publik merupakan salah satu permasalahan serius yang berdampak langsung pada kualitas layanan yang diterima masyarakat. Praktik ini sering terjadi dalam bentuk penyalahgunaan wewenang oleh aparat pemerintah. Akibatnya, pelayanan publik yang seharusnya bersifat transparan dan akuntabel menjadi tidak optimal. Masyarakat tidak memperoleh layanan yang adil dan merata sebagaimana mestinya. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi menjadi penghambat utama dalam mewujudkan good governance (Iwan Ridwan Paturochman, Alysa Rahma Wulan, 2025).

Salah satu sektor yang paling terdampak oleh korupsi adalah sektor pendidikan. Korupsi dalam pendidikan dapat berupa penyalahgunaan anggaran, pungutan liar, hingga manipulasi dana bantuan pendidikan. Dampak dari praktik tersebut adalah menurunnya kualitas pendidikan dan terbatasnya akses bagi masyarakat kurang mampu. Pendidikan yang seharusnya menjadi sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia justru terhambat. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan pendidikan semakin meningkat (Salsabila & Ramdhani, 2024).

Selain pendidikan, sektor kesehatan juga sangat rentan terhadap praktik korupsi. Korupsi dalam sektor ini dapat mengakibatkan berkurangnya kualitas layanan kesehatan yang diterima masyarakat. Misalnya, penyalahgunaan anggaran kesehatan dapat menyebabkan kurangnya fasilitas dan tenaga medis yang memadai. Hal ini berdampak langsung pada menurunnya tingkat kesehatan masyarakat. Dengan demikian, korupsi dalam sektor kesehatan dapat mengancam kesejahteraan masyarakat secara luas .

Korupsi juga menyebabkan ketidakmerataan dalam distribusi layanan publik. Masyarakat yang memiliki akses atau kedekatan dengan kekuasaan cenderung mendapatkan layanan yang lebih baik. Sebaliknya, masyarakat kecil seringkali mengalami diskriminasi dalam memperoleh pelayanan. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan sosial dalam masyarakat.

Lebih lanjut, praktik korupsi dalam pelayanan publik juga mendorong munculnya biaya tambahan yang harus ditanggung oleh masyarakat. Pungutan liar dan praktik suap menjadi hal yang sering terjadi dalam proses pelayanan. Hal ini menyebabkan layanan publik menjadi mahal dan tidak efisien. Masyarakat akhirnya harus mengeluarkan biaya lebih untuk mendapatkan layanan dasar. Kondisi ini tentu merugikan, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (Luthfida Khairunnisa & Permana, 2022).

Secara keseluruhan, korupsi dalam pelayanan publik memberikan dampak negatif yang luas terhadap kehidupan masyarakat. Kualitas layanan menurun, akses menjadi tidak merata, serta biaya pelayanan menjadi semakin tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga secara langsung merugikan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dalam memberantas korupsi di sektor pelayanan publik. Dengan demikian, pelayanan publik yang adil, transparan, dan berkualitas dapat terwujud

Dampak Korupsi terhadap Kepercayaan Masyarakat

Korupsi memiliki dampak yang sangat besar terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara. Kepercayaan merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keberlangsungan pemerintahan. Ketika praktik korupsi terus terjadi, masyarakat mulai meragukan integritas para pejabat publik. Hal ini menyebabkan menurunnya legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Akibatnya, hubungan antara pemerintah dan masyarakat menjadi semakin renggang (Serin Mustari & Ade Mahmud, 2025).

Menurunnya kepercayaan masyarakat juga dipengaruhi oleh banyaknya kasus korupsi yang terungkap di ruang publik. Kasus-kasus tersebut memperkuat persepsi bahwa korupsi telah menjadi budaya dalam sistem pemerintahan. Persepsi negatif ini membuat masyarakat merasa pesimis terhadap upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, transparansi yang rendah dalam penanganan kasus juga memperparah kondisi tersebut. Dengan demikian, kepercayaan publik menjadi semakin sulit untuk dipulihkan. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum sangat dipengaruhi oleh integritas aparat penegak hukum. Profesi hukum yang seharusnya menjadi *officium nobile* justru kehilangan makna ketika terjadi praktik korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran etika tidak hanya merusak sistem hukum, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik terhadap negara (Budi Sastra Panjaitan, Dkk, 2024).

Korupsi di sektor tertentu, seperti perpajakan, secara langsung berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Ketika masyarakat mengetahui adanya praktik korupsi dalam sistem perpajakan, mereka cenderung kehilangan kepercayaan terhadap keadilan sistem tersebut. Hal ini berdampak pada menurunnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Penurunan kepatuhan ini tentu merugikan negara dari sisi penerimaan. Dengan demikian, korupsi tidak hanya merusak kepercayaan, tetapi juga berdampak pada stabilitas ekonomi negara

Selain itu, korupsi di tingkat lokal, seperti dalam pengelolaan dana desa, juga memberikan dampak nyata terhadap kepercayaan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa praktik korupsi dana desa secara signifikan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa. Masyarakat menjadi enggan untuk berpartisipasi dalam program pembangunan yang dijalankan pemerintah. Hal ini menghambat proses pembangunan di tingkat lokal. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat menjadi faktor penting yang sangat dipengaruhi oleh praktik korupsi (Suprianti & Andini, 2025).

Menurunnya kepercayaan masyarakat juga berdampak pada rendahnya partisipasi publik dalam proses pemerintahan. Masyarakat yang tidak percaya cenderung apatis terhadap kebijakan dan program pemerintah. Hal ini menyebabkan berkurangnya kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Padahal, partisipasi masyarakat sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, korupsi secara tidak langsung melemahkan sistem demokrasi.

Secara keseluruhan, korupsi memberikan dampak yang sangat serius terhadap kepercayaan masyarakat. Menurunnya kepercayaan ini tidak hanya berdampak pada hubungan antara masyarakat dan pemerintah, tetapi juga pada efektivitas kebijakan publik. Kondisi ini dapat menciptakan ketidakstabilan sosial dan memperlambat pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi langkah penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Upaya tersebut harus dilakukan secara konsisten dan menyeluruh agar hasilnya dapat dirasakan secara nyata.

Analisis Sederhana (Studi Kasus Korupsi dan Dampaknya terhadap Kepercayaan Masyarakat)

Kasus korupsi bantuan sosial (bansos) pada masa pandemi Covid-19 menjadi salah satu contoh paling nyata bagaimana korupsi merusak kepercayaan masyarakat. Dalam kasus ini, pejabat publik terbukti menerima suap dari pengadaan paket bansos yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat terdampak. Praktik tersebut tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan karena terjadi di tengah kondisi krisis. Masyarakat yang seharusnya dibantu justru menjadi korban dari penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini menyebabkan munculnya rasa marah, kecewa, dan hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah secara signifikan (Shalwa & Mariam, 2025).

Lebih lanjut, penelitian menunjukkan bahwa kasus korupsi bansos berdampak langsung pada persepsi masyarakat terhadap integritas pemerintah. Ketika dana yang bersifat darurat saja masih dikorupsi, masyarakat menilai bahwa sistem pemerintahan tidak memiliki komitmen moral yang kuat. Persepsi ini memperkuat anggapan bahwa korupsi telah mengakar dalam birokrasi. Selain itu, transparansi yang rendah dalam pengelolaan dana publik semakin memperburuk kondisi tersebut. Akibatnya, kepercayaan publik mengalami penurunan yang sulit untuk dipulihkan dalam waktu singkat.

Selain bansos, kasus korupsi di sektor perpajakan juga memberikan dampak signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Contohnya adalah berbagai kasus manipulasi pajak yang melibatkan aparat negara. Praktik tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam sistem yang seharusnya menjunjung tinggi keadilan. Masyarakat kemudian merasa bahwa sistem perpajakan tidak berjalan secara transparan dan adil. Dampaknya, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak cenderung menurun (Kholifah et al., 2025).

Fenomena ini juga diperkuat oleh penelitian yang menunjukkan bahwa korupsi di sektor perpajakan tidak hanya merusak kepercayaan, tetapi juga berdampak pada perilaku masyarakat. Ketika kepercayaan menurun, masyarakat menjadi enggan untuk berpartisipasi dalam kewajiban negara. Hal ini menciptakan siklus negatif yang merugikan negara dalam jangka panjang. Pendapatan negara berkurang akibat rendahnya kepatuhan pajak. Dengan demikian, korupsi tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga ekonomi secara bersamaan.

Kasus korupsi dana desa juga menjadi contoh konkret lainnya yang menunjukkan dampak terhadap kepercayaan masyarakat. Dana desa yang

seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat seringkali disalahgunakan oleh aparat desa. Penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat korupsi dana desa, maka semakin rendah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Kondisi ini membuat masyarakat menjadi apatis terhadap program pembangunan. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa pun menurun drastis (Suprianti & Andini, 2025).

Selain itu, kasus korupsi dalam pengadaan barang publik, seperti benih pertanian di Nusa Tenggara Barat, juga memperlihatkan dampak yang serupa. Korupsi dalam pengadaan tersebut tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan masyarakat secara langsung. Petani sebagai penerima manfaat mengalami kerugian akibat kualitas bantuan yang tidak sesuai. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah sebagai penyedia layanan publik. Korupsi dalam sektor ini bahkan dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat

Secara lebih luas, berbagai kasus korupsi tersebut menunjukkan bahwa dampak utamanya terletak pada runtuhnya kepercayaan publik. Kepercayaan masyarakat merupakan fondasi utama dalam menjalankan pemerintahan yang efektif. Ketika kepercayaan tersebut hilang, maka legitimasi pemerintah juga ikut melemah. Kondisi ini dapat memicu ketidakstabilan sosial dan menurunnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, korupsi tidak hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga masalah sosial yang serius. Dalam berbagai kasus korupsi, lemahnya integritas aparat penegak hukum menunjukkan kegagalan dalam menjalankan fungsi profesinya. Padahal, advokat sebagai *officium nobile* memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan membela kepentingan masyarakat (Panjaitan, 2025).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa berbagai kasus korupsi di Indonesia, baik dalam bansos, perpajakan, maupun dana desa, memiliki dampak yang sangat besar terhadap kepercayaan masyarakat. Dampak tersebut tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat berlangsung dalam jangka panjang. Kepercayaan yang telah rusak memerlukan waktu dan upaya yang besar untuk dipulihkan kembali. Oleh karena itu, diperlukan langkah yang tegas, transparan, dan konsisten dalam pemberantasan korupsi. Upaya ini penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan berintegritas (Bramudia, Muhammad Farhan Asmoro & Hossam, 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa korupsi memiliki dampak yang sangat luas dan kompleks terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam aspek ekonomi, korupsi terbukti menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, serta memperlebar ketimpangan sosial akibat distribusi sumber daya yang tidak merata. Selain itu, praktik korupsi juga menurunkan kepercayaan investor dan menghambat pembangunan nasional secara berkelanjutan. Kondisi ini menciptakan siklus ekonomi yang tidak sehat dan sulit diperbaiki tanpa adanya intervensi yang serius. Dengan demikian, korupsi menjadi faktor utama yang menghambat tercapainya kesejahteraan masyarakat secara optimal

Di sisi lain, korupsi juga berdampak signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Penyalahgunaan anggaran dalam sektor pendidikan dan kesehatan menyebabkan menurunnya kualitas layanan serta terbatasnya akses bagi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah. Praktik pungutan liar dan ketidakadilan dalam pelayanan semakin memperburuk kondisi tersebut. Akibatnya, pelayanan publik tidak lagi berjalan secara efektif, efisien, dan merata. Hal ini

menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga secara langsung merugikan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari

Lebih lanjut, dampak korupsi yang paling krusial adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Banyaknya kasus korupsi yang terungkap di ruang publik menimbulkan persepsi negatif terhadap integritas aparat negara. Kepercayaan yang menurun ini berdampak pada melemahnya legitimasi pemerintah serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Selain itu, menurunnya kepercayaan juga berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan negara, seperti dalam pembayaran pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga secara sosial dan politik

Analisis kasus nyata seperti korupsi bantuan sosial, perpajakan, dan dana desa semakin mempertegas bahwa korupsi memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga merusak rasa keadilan dan kepercayaan publik. Dalam banyak kasus, masyarakat menjadi apatis dan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Hal ini berdampak pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan demikian, korupsi dapat dikatakan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik

Secara keseluruhan, korupsi merupakan permasalahan multidimensional yang mempengaruhi aspek ekonomi, sosial, dan politik secara bersamaan. Dampaknya tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berpotensi merusak sistem kehidupan bernegara dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang tegas. Selain itu, peran aktif masyarakat juga sangat diperlukan dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Upaya kolektif ini menjadi kunci dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas

DAFTAR PUSTAKA

- Alpiani Miulyadi, P. S. (2024). Pengaruh Korupsi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Civilia : Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3, 171–178.
- Bramudia, Muhammad Farhan Asmoro, A. D., & Hossam, T. M. (2025). Dampak Pelaku Pidana Korupsi Bagi Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(6), 288–295.
- Budi Sastra Panjaitan, Putra Halomoan Hsb, Puji Kurniawan, Adi Syahputra Sirait, S. M. (2024). Revitalizing Sharia Advocates: Reforming The Law On Advocates In Strengthening The Role Of Islamic Law In Indonesia. *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 485–504.
- Dea Cintana, Alfiah Salsa Haidillah, Siti Alia Zulfa, Alvira Aprilisha Muhadi, S. K. (2023). Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional. *Journal Of The Research Center For Digital Democracy Volume*, 1(September), 1–17.
- Ihfan, A. N. (2024). Problematika Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang. *Media Juris*, 7(1), 69–100. <https://doi.org/10.20473/Mi.V7i1.44793>
- Iwan Ridwan Paturochman, Alysa Rahma Wulan, (2025). Korupsi Dalam Pelayanan Publik: Tantangan Implementasi Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 3(2), 112–117.
- Kholifah, N., Dewi, D. A., & Maharani, A. S. (2025). Dampak Korupsi Perpajakan Terhadap Kepercayaan Masyarakat Dan Pengaruhnya Bagi Wajib Pajak. *Causa Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 12(12).

- Luthfida Khairunnisa, & Permana, H. (2022). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pelayanan Publik Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 4728–4732.
- Panjaitan, B. S. (2025). Constructive Criticism Of The Role Of Sharia Advocates In Legal Aid In The Contemporary Era. *Milrev: Metro Islamic Law Review*, 4(2), 1359–1392. <https://doi.org/10.32332/Milrev.V4i2.11294>
- Pratama, (2025). Dampak Korupsi Terhadap Sistem Ekonomi Dan Sosial Di Indonesia. *Al-Dalil Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 3(2), 51–54.
- Rizky Subhan. (2024). Dampak Korupsi Terhadap Perekonomian Di Indonesia. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, 2(3), 422–430. <https://pchukumsosial.org/index.php/pchs>
- Salsabila, F. N., & Ramdhani, M. F. (2024). Dampak Sistemik Korupsi Terhadap Perekonomian, Sistem Pendidikan, Dan Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia: Sebuah Analisis Komprehensif. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(6), 210–220.
- Serin Mustari, & Ade Mahmud. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Koruptor Di Rutan Dan Upaya Peningkatan Kepercayaan Masyarakat. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 65–72. <https://doi.org/10.29313/Jrih.V5i1.6471>
- Shalwa, N., & Mariam, S. (2025). Analisis Mendalam Kasus Korupsi Bansos Juliari: Perspektif Hukum Dan Respon Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(A), 196–206.
- Suprianti, D., & Andini, L. A. (2025). Pengaruh Praktik Korupsi Dana Desa Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Pada Pemerintah Desa Lorong Kabupaten Sambas. *Seminar Nasional Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Dan Ilmu Politik Universitas Terbuka*, 438–445.
- Tyas, I. A. (2024). Dampak Kejahatan Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi : Sebuah Kajian Literatur. *Neraca Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1192, 304–317.
- Uzumaki, A., Awaliyah, S., Rahmadina, S., Saiyati, Pratiwi, S., Susanterilila, & Putra, A. R. (2025). Dampak Korupsi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal Of Economics And Business*, 5(3), 6222.